

IMPLEMENTASI NILAI AMANAH DAN KEADILAN DALAM ADMINISTRASI KEUANGAN DESA PERSPEKTIF AKSIOLOGI EKONOMI ISLAM DI DESA RACI KULON SIDAYU GRESIK

Muhammad Ariesdy Prawiranegara
Surel: ariesdiprawiranegara2@gmail.com
(UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the value of trust and justice in the financial administration of Raci Kulon Village, Sidayu District, Gresik Regency based on the perspective of Islamic Economic Axiology. The study used a qualitative approach with the type of case study. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusions. The results showed that the value of trust has been applied through financial management that emphasizes responsibility, transparency, and accountability at every stage of Village Financial Administration. The value of justice is realized through the allocation of village funds tailored to the needs of the community, especially in infrastructure development, economic empowerment, and public services. However, the implementation of these two values still faces obstacles in the aspects of internal supervision and understanding of the village apparatus towards the principles of Islamic Economic Axiology. This study concludes that the financial management of Raci Kulon village has reflected the principles of trust and justice, but it is still necessary to strengthen the internalization of Islamic economic values in order to increase transparency, accountability, and realize village financial governance that is more equitable and oriented to the benefit of the community.

Keyword: *Amanah, Justice, Village Financial Administration, Islamic Economic Axiology.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai amanah dan keadilan dalam administrasi keuangan Desa Raci Kulon, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik berdasarkan perspektif aksiologi ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah telah diterapkan melalui pengelolaan keuangan yang mengedepankan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas pada setiap tahapan administrasi keuangan desa. Nilai keadilan diwujudkan melalui pengalokasian dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, implementasi kedua nilai tersebut masih menghadapi kendala pada aspek

pengawasan internal dan pemahaman aparaturnya terhadap prinsip-prinsip aksiologi ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Raci Kulon telah mencerminkan prinsip amanah dan keadilan, namun masih diperlukan penguatan internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Amanah, Keadilan, Administrasi Keuangan Desa, Aksiologi Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Besarnya alokasi dana desa yang diberikan pemerintah setiap tahun menuntut aparaturnya untuk mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.¹ Namun demikian, berbagai kasus penyalahgunaan dana desa, manipulasi anggaran, serta lemahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan masih banyak ditemukan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan regulatif, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya internalisasi nilai-nilai moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.²

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai amanah dan keadilan.³ Amanah dimaknai sebagai

¹ Bambang Arianto and Agus Gunawan, "Studi Fenomenologi Tata Kelola Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi* 4, no. 2 (December 2024): 48–64, <https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i2.489>.

² Wahyu Donri Tinambunan et al., "Sinergi Hukum Dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Dedikasi Hukum* 5, no. 3 (December 2025): 407–29, <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i3.42657>.

³ Iklimah Nur Sholeha and Ersi Sisdiyanto, "Analisis Praktik Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung," *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 1, no. 4 (November 2024): 387–400, <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.528>.

tanggung jawab moral dalam mengelola sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt, sedangkan keadilan mengandung makna distribusi hak dan sumber daya secara proporsional untuk mencapai kemaslahatan bersama.⁴ Kedua nilai tersebut merupakan bagian dari aksiologi ekonomi Islam yang menempatkan dimensi etika sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi nilai amanah dan keadilan menjadi fondasi penting dalam menciptakan administrasi keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁵

Permasalahan yang masih sering muncul adalah adanya kesenjangan antara regulasi pengelolaan keuangan desa dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan sistem pengawasan, praktik penyimpangan anggaran, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam tata kelola keuangan desa.⁶ Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka tujuan pembangunan desa, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah desa akan semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam sebagai dasar pengelolaan keuangan desa.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan keuangan desa dari berbagai perspektif. Penelitian Muhamad Tamsir dkk. menyoroti pentingnya

⁴ Amrizal Hamsa, Sumardi Efendi, and Mayasari Mayasari, "Etika Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam: Kajian Atas Prinsip Amanah Dan Keadilan Sosial," *AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM*, December 24, 2025, 145–60, <https://doi.org/10.47498/jau.v4i2.5941>.

⁵ "Epistemologi, Ontologi, Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Islam Dalam Kerangka Falsafah Ekonomi Syariah | JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam," accessed July 19, 2026, <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/4705>.

⁶ Muhammad Mudhofar, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (April 2022): 21–30, <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>.

⁷ Dedi Setyo R and Salahudin Salahudin, "Pengembangan Dan Percepatan Pencapaian Tujuan Pemerataan Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (February 2022): 674–95, <https://doi.org/10.56552/jisipol.v3i2.71>.

pengawasan keuangan desa dalam perspektif Islam dan otonomi lokal sebagai upaya mencegah penyimpangan anggaran.⁸ Penelitian Ahmad Ali Kamal dkk. menegaskan bahwa nilai amanah dan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam pengembangan ekonomi Islam.⁹ Sedangkan penelitian Seftia dkk. membahas aksiologi ekonomi Islam sebagai fondasi etis dalam aktivitas ekonomi.¹⁰ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek konseptual, pengawasan, maupun pengembangan ekonomi Islam secara umum, sehingga belum memberikan kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi nilai amanah dan keadilan dalam administrasi keuangan desa berdasarkan perspektif aksiologi ekonomi Islam pada tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa masih terbatasnya kajian empiris yang mengintegrasikan konsep aksiologi ekonomi Islam dengan praktik administrasi keuangan desa. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui analisis implementasi nilai amanah dan keadilan pada seluruh tahapan administrasi keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban, serta mengkaji dampaknya terhadap tata kelola keuangan desa berdasarkan perspektif aksiologi ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mengevaluasi dimensi etis dan spiritual dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai implementasi aksiologi

⁸ Muhamad Tamsir, Ardiansah Ardiansah, and Bagio Kadaryanto, "Pengawasan Keuangan Desa Dalam Konteks Islam Dan Otonomi Lokal: Studi Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau," *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 21, no. 1 (March 2025): 1-13, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.35864>.

⁹ Ahmad Ali Kamal et al., "Pengembangan Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Melalui Pendekatan Filsafat Ekonomi Islam," *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 6, no. 1 (February 2026): 152-68, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v6i1.4732>.

¹⁰ Seftia Rendiani Sitorus, Sri Sudiarti, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Asahan)," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 02 (June 2024): 601-11, <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.34140>.

ekonomi Islam dalam administrasi publik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai amanah dan keadilan dalam administrasi keuangan Desa Raci Kulon, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik berdasarkan perspektif aksiologi ekonomi Islam serta mengkaji dampaknya terhadap tata kelola keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Keuangan Desa

Administrasi keuangan desa merupakan keseluruhan proses pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).¹¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.¹² Administrasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai proses pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).¹³

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas administrasi keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, sistem pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Administrasi keuangan yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan efektivitas pembangunan desa sekaligus memperkuat kepercayaan

¹¹ Marselina Afrila Wio, Andreas Rengga, and Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur," *Jurnal Projemen UNIPA* 10, no. 3 (September 2023): 103-14, <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i3.154>.

¹² "PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 19, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.

¹³ Yudea Yudea, Yudhi Hendrawan, and Siti Syaripah Fitriani, *Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa Yang Transparan: Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sesulu, Kecamatan Waru*, April 29, 2026, <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/649>.

masyarakat terhadap pemerintah desa.¹⁴ Sebaliknya, lemahnya administrasi keuangan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran, rendahnya transparansi, serta menurunnya akuntabilitas publik. Oleh karena itu, administrasi keuangan desa harus dipandang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan public.¹⁵

2. Nilai Amanah dan Keadilan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan publik harus berlandaskan nilai amanah dan keadilan. Amanah merupakan prinsip moral yang menuntut setiap pengelola keuangan menjalankan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt.¹⁶ Sementara itu, keadilan mengandung makna menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sehingga setiap kebijakan keuangan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.¹⁷

Penerapan nilai amanah tercermin dalam transparansi pengelolaan anggaran, ketepatan penggunaan dana sesuai perencanaan, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Adapun nilai keadilan diwujudkan melalui distribusi anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan perlindungan terhadap kelompok yang membutuhkan. Kedua nilai tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, keberhasilan

¹⁴ Muhammad Nasir, "Implementasi Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa," *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal* 4, no. 3 (March 2025): 468–78, <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.82>.

¹⁵ Ronald Tambunan et al., "Politik Hukum Penguatan Pengaturan Pengawasan Dana Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Desa Dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (June 2026): 2414–27, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i11.2421>.

¹⁶ Alfera Rahmawati et al., "Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 10, no. 2 (June 2025): 299–317, <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.473>.

¹⁷ Imama Zuchroh, "Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 12, no. 2 (May 2024): 135–39, <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737>.

administrasi keuangan desa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari sejauh mana nilai amanah dan keadilan diimplementasikan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.¹⁸

3. Perspektif Aksiologi Ekonomi Islam dalam Administrasi Keuangan Desa

Aksiologi ekonomi Islam merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tujuan, nilai, dan etika dalam aktivitas ekonomi.¹⁹ Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang lebih menekankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, aksiologi ekonomi Islam menempatkan nilai moral sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi dasar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.²⁰

Dalam konteks administrasi keuangan desa, perspektif aksiologi ekonomi Islam memberikan kerangka analisis untuk menilai apakah pengelolaan keuangan tidak hanya memenuhi aspek legal dan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis. Penggunaan dana desa harus diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjamin pemerataan pembangunan.²¹ Oleh karena itu, penerapan aksiologi ekonomi Islam menjadi pendekatan yang relevan dalam mengevaluasi kualitas tata kelola keuangan desa. Pendekatan ini mampu melengkapi konsep good governance dengan memasukkan dimensi moral dan spiritual sehingga pengelolaan keuangan desa tidak

¹⁸ Nurul Citra Lestari et al., "Manajemen Keuangan Dalam Pendidikan Agama Islam," *EDUMULYA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (September 2025): 79–91, <https://doi.org/10.59166/edumulya.v3i1.349>.

¹⁹ Nahlah Nahlah, Asriadi Arifin, and Muh Ridwan Markarma, "Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi; Epistemologi; Aksiologi)," *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2, no. 3 (September 2024): 186–94, <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i3.815>.

²⁰ Muhammad Syauqi Yunilhamri et al., "Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 2024): 329–47, <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i2.22989>.

²¹ Anggun Khairunnisa Agustin et al., "Konsep Dasar Ekonomi Islam Dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern," *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 2, no. 1 (2025): 490–501, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3504>.

hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga bernilai ibadah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.²²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study) sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, yang bertujuan memahami secara mendalam implementasi nilai amanah dan keadilan dalam administrasi keuangan desa berdasarkan perspektif aksiologi ekonomi Islam.²³ Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Raci Kulon, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik pada bulan November hingga Desember 2025. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena pengelolaan keuangan desa dalam konteks sosial dan kelembagaan yang nyata.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang memahami proses pengelolaan keuangan desa. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen penatausahaan, serta berbagai peraturan dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada tahapan analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

²² Rifa Nabila Zahra et al., "Kritik Filsafat Ilmu terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Era Modern," *An-Najah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 01 (July 2026), <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/article/view/552>.

²³ John W. Creswell et al., "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation," *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 2007): 236–64, <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.

kesimpulan. Seluruh data yang diperoleh terlebih dahulu diklasifikasikan dan diseleksi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan melalui proses verifikasi secara berulang dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (triangulasi) sehingga diperoleh temuan yang valid mengenai implementasi nilai amanah dan keadilan dalam administrasi keuangan Desa Raci Kulon berdasarkan perspektif aksiologi ekonomi Islam.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi keuangan di Desa Raci Kulon dilaksanakan berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diawali melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat untuk menentukan program prioritas pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran dilakukan oleh perangkat desa sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan didukung administrasi keuangan yang terdokumentasi melalui buku kas umum, buku bank, buku pajak, serta laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, implementasi nilai amanah dalam administrasi keuangan Desa Raci Kulon tercermin dari komitmen aparatur desa dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Aparatur desa berupaya melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam musyawarah desa serta menyusun laporan

²⁴ Ibid.

pertanggungjawaban secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi juga diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan negara.

Selain nilai amanah, penelitian ini menemukan bahwa nilai keadilan diwujudkan melalui pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara proporsional. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh warga desa. Penetapan program pembangunan dilakukan melalui mekanisme musyawarah sehingga masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang dianggap mendesak. Dengan demikian, distribusi anggaran tidak hanya berorientasi pada pemerataan pembangunan, tetapi juga memperhatikan asas kemanfaatan dan kepentingan bersama sebagai wujud penerapan nilai keadilan dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi nilai amanah dan keadilan. Kendala tersebut antara lain masih perlunya penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam administrasi keuangan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, komitmen aparatur desa, dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas serta akuntabilitas.

Ditinjau dari perspektif aksiologi ekonomi Islam, pengelolaan keuangan Desa Raci Kulon pada dasarnya telah mencerminkan implementasi nilai amanah dan

keadilan sebagai prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan. Nilai amanah tercermin melalui tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa secara transparan, sedangkan nilai keadilan diwujudkan melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep aksiologi ekonomi Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi dan administrasi publik tidak hanya sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian yang mengandung nilai moral, etika, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Oleh karena itu, implementasi nilai amanah dan keadilan perlu terus diperkuat agar tata kelola keuangan desa tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, berkeadilan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai amanah dan keadilan dalam administrasi keuangan Desa Raci Kulon telah diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Nilai amanah tercermin melalui pengelolaan keuangan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab aparatur desa, sedangkan nilai keadilan diwujudkan melalui pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai aksiologi ekonomi Islam sebagai landasan etis dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, penerapan nilai amanah dan keadilan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga bernilai moral dan spiritual.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa, yaitu Desa Raci Kulon, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintahan desa dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan lebih menggambarkan kondisi empiris pada lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak desa dengan karakteristik yang beragam, menggunakan cakupan informan yang lebih luas, atau mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai aksiologi ekonomi Islam dalam administrasi keuangan desa. Hasil penelitian yang lebih luas diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Anggun Khairunnisa, Cici El Dirrah Syafitri Simanungkalit, Syahla Nabila, and Ahmad Wahyudi Zein. "Konsep Dasar Ekonomi Islam Dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 2, no. 1 (2025): 490–501. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3504>.
- Arianto, Bambang, and Agus Gunawan. "Studi Fenomenologi Tata Kelola Dana Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi* 4, no. 2 (December 2024): 48–64. <https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i2.489>.
- Creswell, John W., William E. Hanson, Vicki L. Clark Plano, and Alejandro Morales. "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation." *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 2007): 236–64. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018." Accessed July 19, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.
- "Epistemologi, Ontologi, Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Islam Dalam Kerangka Falsafah Ekonomi Syariah | JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam."

Accessed July 19, 2026.
<https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/4705>.

- Hamsa, Amrizal, Sumardi Efendi, and Mayasari Mayasari. "Etika Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam: Kajian Atas Prinsip Amanah Dan Keadilan Sosial." *AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM*, December 24, 2025, 145–60. <https://doi.org/10.47498/jau.v4i2.5941>.
- Kamal, Ahmad Ali, Shalahudin Habibullah, Ummi Kaltsum Karunianing, Desta Marta Nita, and Madnasir. "Pengembangan Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Melalui Pendekatan Filsafat Ekonomi Islam." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 6, no. 1 (February 2026): 152–68. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v6i1.4732>.
- Lestari, Nurul Citra, Reffy Ananda Rizki, Suprihatin, Dikriyah, Nazwatul Padilah, Nurjamilah, and Ilma. "Manajemen Keuangan Dalam Pendidikan Agama Islam." *EDUMULYA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (September 2025): 79–91. <https://doi.org/10.59166/edumulya.v3i1.349>.
- Mudhofar, Muhammad. "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (April 2022): 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>.
- Nahlah, Nahlah, Asriadi Arifin, and Muh Ridwan Markarma. "Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi; Epistemologi; Aksiologi)." *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2, no. 3 (September 2024): 186–94. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i3.815>.
- Nasir, Muhammad. "Implementasi Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa." *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 4, no. 3 (March 2025): 468–78. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.82>.
- R, Dedi Setyo, and Salahudin Salahudin. "Pengembangan Dan Percepatan Pencapaian Tujuan Pemerataan Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (February 2022): 674–95. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v3i2.71>.
- Rahmawati, Alfera, Iman Azril, Afifah Yoga Agustiana, Johan Andriesgo, Aini Gustia, Mukhlisin Mukhlisin, and Suri Eka Wahyuni. "Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah* 10, no. 2 (June 2025): 299–317. <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.473>.
- Sholeha, Iklimah Nur, and Ersi Sisdianto. "Analisis Praktik Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung."

JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI 1, no. 4 (November 2024): 387–400. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.528>.

- Sitorus, Seftia Rendiani, Sri Sudiarti, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Gunung Berkat Kecamatan Bandar Pulau Asahan)." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 02 (June 2024): 601–11. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.34140>.
- Tambunan, Ronald, Agung Pramono, Bambang Chandra, Rosyaria Meila, and D. Andry Effendy. "Politik Hukum Penguatan Pengaturan Pengawasan Dana Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Desa Dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (June 2026): 2414–27. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i11.2421>.
- Tamsir, Muhamad, Ardiansah Ardiansah, and Bagio Kadaryanto. "Pengawasan Keuangan Desa Dalam Konteks Islam Dan Otonomi Lokal: Studi Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 21, no. 1 (March 2025): 1–13. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.35864>.
- Tinambunan, Wahyu Donri, Wiwin Triyunarti, Soni Okabrian, and Afifa Nurhanifah. "Sinergi Hukum Dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Akuntabilitas Dana Desa Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 5, no. 3 (December 2025): 407–29. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i3.42657>.
- Wio, Marselina Afrila, Andreas Rengga, and Magdalena Silawati Samosir. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur." *Jurnal Projemen UNIPA* 10, no. 3 (September 2023): 103–14. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i3.154>.
- Yudea, Yudea, Yudhi Hendrawan, and Siti Syaripah Fitriani. *Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa Yang Transparan: Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sesulu, Kecamatan Waru*. April 29, 2026. <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/649>.
- Yunilhamri, Muhammad Syauqi, Wahyudi Wahyudi, Syahpawi Syahpawi, and Muhammad Albahi. "Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 2024): 329–47. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i2.22989>.
- Zahra, Rifa Nabila, Syerrima Azzahra, Tasya Febrianti, Tara Safna, Zia Cariska, and Abi Waqqosh. "Kritik Filsafat Ilmu terhadap Perkembangan Ekonomi Islam di Era Modern." *An-Najah: Journal of Islamic Economics* 2, no. 01 (July 2026). <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/article/view/552>.

Zuchroh, Imama. "Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 12, no. 2 (May 2024): 135–39. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737>.